

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2020 merupakan salah satu momentum politik yang paling kompleks dalam sejarah Indonesia modern. Kompleksitas tersebut terutama dipicu oleh situasi krisis kesehatan akibat pandemi Covid-19 yang melanda seluruh dunia, termasuk Indonesia. Berbeda dari kontestasi elektoral pada periode-periode sebelumnya, penyelenggaraan Pilkada 2020 harus berlangsung di tengah kondisi darurat kesehatan yang menuntut tersedianya protokol ketat demi menjaga keamanan pemilih maupun penyelenggara pemilu. Pandemi Covid-19 menyebabkan perubahan signifikan pada seluruh sektor kehidupan, mulai dari ekonomi, pendidikan, kesehatan, hingga tata kelola pemerintahan. Situasi ini turut memengaruhi dinamika politik, terutama terkait partisipasi masyarakat dalam proses pemilihan kepala daerah. Pemerintah bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), serta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) kemudian melakukan berbagai penyesuaian untuk memastikan Pilkada tetap dapat berlangsung tanpa mengesampingkan keamanan publik. Pilkada yang semula direncanakan pada tanggal 23 September 2020 harus ditunda melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara DPR, KPU, dan Kemendagri pada 30 Maret 2020 sebagai respon atas meningkatnya kasus Covid-19. Setelah mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk kesiapan daerah dan protokol kesehatan, pemerintah resmi menetapkan bahwa pemungutan suara Pilkada serentak akan dilaksanakan pada 9 Desember 2020 dengan menerapkan protokol kesehatan yang telah dirancang secara ketat.(Biroroh 2021).

Keputusan ini memberikan ruang bagi penyelenggara untuk menyiapkan protokol kesehatan secara menyeluruh, baik pada tahap kampanye, pemutakhiran data pemilih, distribusi logistik, hingga pelaksanaan pemungutan suara. Kebijakan ini menunjukkan bahwa demokrasi lokal tetap dianggap sebagai aspek fundamental negara yang harus dijaga keberlangsungannya meskipun berada pada masa krisis.

Dalam konteks Kota Makassar, Pilkada 2020 juga mendapat perhatian khusus. Makassar pada saat itu merupakan salah satu kota dengan tingkat penyebaran Covid-19 yang cukup tinggi di Sulawesi Selatan. Namun, di balik situasi tersebut, terdapat satu wilayah yang menunjukkan dinamika politik yang menarik, yaitu Kecamatan Kepulauan Sangkarrang. Kecamatan ini merupakan wilayah kepulauan yang relatif baru berdiri sebagai kecamatan definitif, dan memiliki karakteristik geografis yang sangat berbeda dibandingkan kecamatan di daratan Kota Makassar.

Kepulauan Sangkarrang terdiri atas beberapa pulau, seperti Barrang Lompo dan Barrang Caddi, yang jaraknya cukup jauh dari pusat pemerintahan kota. Kondisi geografis yang terpisah oleh laut menjadikan akses transportasi, informasi, dan pelayanan publik di wilayah ini memiliki keterbatasan yang lebih besar dibandingkan kecamatan di wilayah perkotaan. Dalam konteks Pilkada, karakteristik ini biasanya diasosiasikan dengan rendahnya tingkat partisipasi politik karena keterbatasan mobilitas dan akses informasi politik.

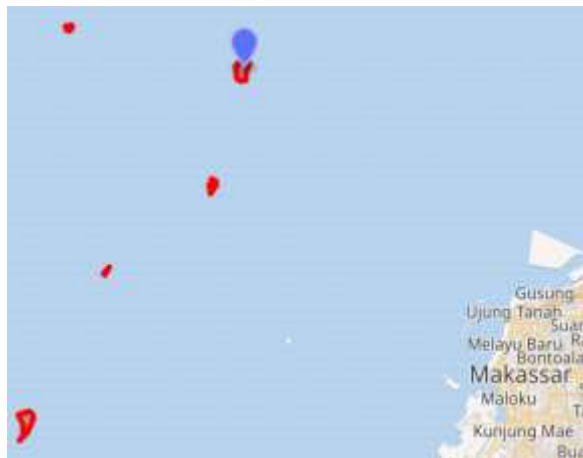
Kota Makassar merupakan salah satu daerah yang menyelenggarakan Pilkada pada tahun 2020. Jika menilik data pada penyelenggaraan Pilkada sebelumnya, partisipasi masyarakat menunjukkan dinamika yang cukup menarik. Pada Pilkada Wali Kota Makassar tahun 2018, jumlah daftar pemilih tetap (DPT) tercatat sebanyak 990.836 pemilih, dengan jumlah pengguna hak pilih sebesar 584.406 orang atau 58,98% . Sementara pada Pilkada tahun 2020, yang dilaksanakan dalam kondisi pandemi, jumlah DPT tercatat sebanyak 921.696 pemilih dan jumlah pengguna suara 537.585 orang atau 59,66%— terjadi peningkatan partisipasi sebesar 1,5% dibanding Pilkada 2018.

Data ini memperlihatkan bahwa pandemi tidak serta-merta menurunkan partisipasi masyarakat dalam pemilihan kepala daerah. Dengan penerapan protokol kesehatan dan desain pemilihan yang adaptif, masyarakat tetap menunjukkan minat untuk berpartisipasi dalam menentukan arah pemerintahan daerah. Secara lebih rinci, tingkat partisipasi pemilih di setiap kecamatan di Kota Makassar menunjukkan variasi yang cukup signifikan. Kecamatan Tallo, khususnya Kelurahan Lakkang, tercatat sebagai wilayah dengan tingkat partisipasi tertinggi mencapai 88,79%. Namun yang menarik adalah kenyataan bahwa Kecamatan Kepulauan Sangkarrang, salah satu wilayah dengan karakteristik geografis kepulauan dan akses terbatas, justru

menjadi salah satu kecamatan dengan tingkat partisipasi yang tinggi pula. Fenomena ini bertolak belakang dengan sejumlah penelitian terdahulu yang menunjukkan bahwa masyarakat pesisir atau kepulauan cenderung memiliki tingkat partisipasi rendah akibat faktor akses, ekonomi, informasi, dan mobilitas.

Kecamatan Kepulauan Sangkarrang merupakan kecamatan termuda di Kota Makassar, hasil pemekaran dari Kecamatan Ujung Tanah pada tahun 2017. Kecamatan ini terdiri dari tiga kelurahan yakni Barang Caddi, Barang Lompo, dan Kodingareng, dengan pusat administrasi berada di Pulau Barang Lompo. Secara geografis, wilayah ini berada jauh dari daratan utama Kota Makassar, sehingga akses transportasi, layanan publik, dan informasi cenderung lebih terbatas dibandingkan wilayah perkotaan. Sebagian besar penduduk bermata pencaharian sebagai nelayan, sehingga tingkat mobilitas masyarakat sangat bergantung pada kondisi cuaca dan musim melaut.

Gambar 1. Wilayah administrasi Kecamatan Kepulauan Sangkarrang



Sumber : Website Kecamatan Kepulauan Sangkarrang

Kondisi geografis seperti ini biasanya menjadi faktor penghambat tingginya partisipasi pemilih. Dalam beberapa penelitian tentang masyarakat pesisir, angka partisipasi seringkali berada pada tingkat rendah. Misalnya, penelitian oleh Ilma Nur Amalia (2015) mengenai partisipasi politik masyarakat pesisir di Desa Bonang, Kabupaten Rembang, menemukan bahwa tingkat partisipasi tergolong rendah, dipengaruhi oleh faktor visi-misi calon, akses informasi, ekonomi, karakteristik calon, serta lingkungan dan keluarga

Namun fenomena berbeda terjadi di Kecamatan Kepulauan Sangkarrang. Berdasarkan data KPU Kota Makassar, tingkat partisipasi pemilih pada Pilkada 2020 mencapai 71% dengan jumlah pemilih (DPT + DPTb) sebanyak 9.635 dan jumlah pengguna hak pilih (DPT + DPTb + DPPh) sebanyak 6.759 orang. Angka ini jauh lebih tinggi dibandingkan beberapa kecamatan di wilayah perkotaan seperti Wajo dan Ujung Pandang yang hanya mencapai 45–50% partisipasi pemilih. Dengan demikian, wilayah kepulauan justru menunjukkan partisipasi yang lebih tinggi dibanding wilayah kota yang memiliki akses lebih memadai.

Gambar 2. Kecamatan dengan tingkat partisipasi tertinggi tahun 2020



Sumber : Instagram KPU Kota Makassar

Temuan ini menjadi menarik karena tingkat partisipasi sebesar 71% di wilayah kepulauan tidak hanya melampaui angka partisipasi Kota Makassar secara keseluruhan, tetapi juga bertentangan dengan asumsi bahwa keterbatasan geografis dan pandemi akan menurunkan minat pemilih. Dalam konteks teori Almond dan Verba, hal ini mengindikasikan adanya peningkatan kesadaran politik (political awareness) yang cukup kuat di masyarakat Sangkarrang, baik dari aspek kesadaran input (pemahaman terhadap informasi politik) maupun kesadaran output (harapan terhadap hasil kebijakan).

Aksesibilitas merupakan salah satu faktor yang sering dikaitkan dengan rendahnya partisipasi masyarakat kepulauan dalam pemilihan. Wawancara dengan masyarakat Sangkarrang menunjukkan bahwa musim dan jarak lokasi melaut menjadi faktor utama yang memengaruhi apakah mereka dapat datang menggunakan hak pilih atau tidak. Seorang warga menyatakan bahwa “partisipasi pemilih di kepulauan Sangkarrang dipengaruhi oleh musim, kadang kami pergi melaut dan lokasinya jauh sehingga tidak memungkinkan untuk datang memilih”. Selain itu, kondisi ekonomi masyarakat kepulauan—yang sebagian besar berada pada kategori menengah ke bawah—membatasi akses mereka terhadap informasi dan sarana transportasi. Hal ini sejalan dengan teori Ramlan Subakti yang menyebutkan bahwa partisipasi politik sangat dipengaruhi oleh status sosial, ekonomi, afiliasi politik, dan pengalaman berorganisasi.

Dengan keterbatasan tersebut, seharusnya wilayah kepulauan seperti Sangkarrang menghadapi kendala partisipasi yang lebih besar selama pandemi. Namun kenyataannya berbeda: akses yang terbatas tidak menghambat keterlibatan masyarakat dalam proses pemilihan. Ini menunjukkan adanya faktor-faktor lain yang berkontribusi pada peningkatan partisipasi pemilih.

Dalam konteks Pilkada 2020, pandemi Covid-19 menciptakan dinamika psikologis dan sosial baru bagi masyarakat. Ancaman kesehatan yang dirasakan secara langsung oleh seluruh lapisan masyarakat mendorong kesadaran untuk memilih pemimpin yang dianggap mampu mengambil kebijakan tepat dalam mengatasi krisis. Dalam teori pilihan rasional (*rational choice*), pemilih akan mengambil keputusan berdasarkan analisis manfaat dan biaya, memilih kandidat yang mereka nilai mampu memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan dan keamanan mereka di masa krisis.

Selain itu, KPU Kota Makassar melakukan berbagai upaya sosialisasi di wilayah kepulauan untuk memastikan masyarakat memahami prosedur pemungutan suara di masa pandemi. Hal ini dilihat dari tim pelaksana pilkada pada Kota Makassar tahun 2020 dengan harapan intensitas sosialisasi lebih masif disemua wilayah, dan memberikan kontribusi terhadap peningkatan kesadaran politik masyarakat

Tabel 1. Tim Pelaksana Pilkada Kota Makassar tahun 2020

No	Keterangan Tim	Jumlah
1	TPS	2.394
2	PPK	75
3	PPS	459
4	PKKS	16.758
5	PPDP	2.324

Sumber: KPU Kota Makassar 2020

Fenomena meningkatnya partisipasi di tengah pandemi dan keterbatasan geografis memperkuat pandangan bahwa kesadaran politik masyarakat Sangkarrang tidak bersifat pasif. Masyarakat tidak lagi sekadar menunggu informasi datang kepada mereka, melainkan menunjukkan kemandirian dalam mencari informasi dan menentukan pilihan politik secara rasional. Dalam teori Almond dan Verba, kondisi ini menunjukkan masyarakat berada dalam kategori civic culture, yaitu budaya politik yang ditandai oleh keterlibatan aktif warga dalam proses politik.

Fenomena peningkatan partisipasi masyarakat Kepulauan Sangkarrang pada Pilkada 2020 memberikan peluang bagi kajian akademik untuk memahami bagaimana kondisi geografis, situasi pandemi, dan kesadaran politik berinteraksi dalam memengaruhi perilaku pemilih. Ketidaksesuaian antara asumsi penelitian sebelumnya dengan realitas empiris di Sangkarrang mengindikasikan adanya dinamika sosial-politik unik yang perlu ditelaah lebih jauh. Dengan tingkat partisipasi 71%—lebih tinggi dari beberapa kecamatan di wilayah daratan—wilayah ini menunjukkan bahwa kondisi marjinal secara geografis tidak selalu menjadi penghambat partisipasi politik.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi peningkatan partisipasi masyarakat di Kecamatan Kepulauan Sangkarrang pada Pilkada Makassar 2020, dengan fokus pada aspek kesadaran politik sebagai variabel kunci. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian ini menyoroti bagaimana masyarakat memahami situasi pandemi, bagaimana mereka mengakses informasi, serta motivasi apa yang mendorong mereka tetap berpartisipasi dalam pemilihan di tengah

keterbatasan.

1.2 Rumusan Masalah

Dari penjelasan latar belakang di atas, peneliti membatasi rumusan masalah yang diteliti, menjadi :

1. Bagaimana tingkat dan bentuk kesadaran politik masyarakat Kepulauan Sangkarrang pada Pilkada Makassar 2020 ?
2. Faktor apa saja yang mempengaruhi peningkatan partisipasi politik masyarakat Kepulauan Sangkarrang di Pilkada tahun 2020 di tengah pandemic Covid-19 ?
3. Bagaimana hubungan antara kesadaran politik dengan peningkatan partisipasi pemilih di Kecamatan Kepulauan Sangkarrang dalam konteks Pilkada 2020 ?.

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

1. Menjelaskan tingkat dan bentuk kesadaran politik masyarakat Kepulauan Sangkarrang pada Pilkada Makassar 2020 di masa pandemi Covid-19.
2. Mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi politik masyarakat marginal, khususnya masyarakat di wilayah kepulauan seperti Kecamatan Sangkarrang dalam Pilkada 2020.
3. Menganalisis hubungan antara kesadaran politik dan partisipasi pemilih dalam konteks Pilkada Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar tahun 2020.

1.3.2 Manfaat Penelitian

a. Manfaat akademis

1. Memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan program magister (S2) pada Program Studi Ilmu Politik di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin.
2. Berkontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan

secara umum, khususnya dalam bidang ilmu politik.

b. Manfaat Praktis

1. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi yang berguna bagi pihak-pihak yang ingin memahami bagaimana pengaruh Pandemi covid-19 terhadap masyarakat kepulauan khususnya dalam melihat kesadaran politik dan partisipasi politiknya.
2. Memberikan rekomendasi bagi KPU dan Pemerintah Kota Makassar dalam mendesain strategi sosialisasi politik yang inklusif untuk wilayah kepulauan maupun marginal di masa krisis

1.4 Kajian Teori

1.4.1 Konsep Pandemi dan New Normal

Pandemi merupakan suatu kondisi ketika sebuah penyakit mengalami peningkatan jumlah kasus secara drastis dalam kurun waktu singkat dan menyebar ke wilayah geografis yang luas, bahkan lintas negara. Definisi ini menekankan bahwa suatu penyakit dapat dikategorikan sebagai pandemi apabila penularannya terjadi secara cepat, masif, dan berkelanjutan dalam berbagai wilayah sehingga berpotensi mengganggu kehidupan sosial dan kesehatan masyarakat dalam skala global. Contoh paling nyata dari fenomena ini adalah Covid-19, penyakit yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2, yang kemudian dinyatakan sebagai pandemi global oleh World Health Organization (WHO) setelah penyebarannya menjangkau hampir seluruh negara di dunia. Organisasi Kesehatan Dunia (World Health Organization/WHO) menetapkan Coronavirus Disease 2019, yang lebih dikenal dengan sebutan Covid-19, sebagai sebuah ancaman pandemi global.

Tingginya tingkat penyebaran virus ini mendorong pemerintah untuk segera mengambil langkah-langkah strategis melalui penetapan berbagai kebijakan antisipatif guna mengendalikan dan membatasi penyebaran Covid-19

secara lebih luas (Umayyah and Daming 2021). Berdasarkan penjelasan di atas peneliti dapat menyimpulkan bahwa pandemi merupakan suatu penyakit yang di kategorikan sebagai pandemi jika penyakit tersebut dapat berkembang di beberapa wilayah dengan sangat cepat dan meluas yang menyebabkan penularan setempat. Untuk memahami karakter virus berikut cara untuk menjinakkannya, desakan untuk melakukan normalisasi berbagai sektor kehidupan, khususnya ekonomi tidak terelakkan. WHO memperkenalkan konsep *new normal* sebagai kerangka adaptasi masyarakat untuk dapat menjalankan aktivitas sosial dan ekonomi sembari meminimalkan risiko penularan Covid-19. Konsep ini menekankan perlunya penataan ulang pola hidup, perilaku, serta lembaga sosial-politik agar mampu menyesuaikan diri terhadap kondisi pandemi melalui penerapan protokol kesehatan, seperti pembatasan fisik, penggunaan masker, menjaga kebersihan diri, serta pengaturan aktivitas publik sesuai standar kesehatan yang berlaku. Dalam kampanye *new normal*, yang muncul kemudian adalah berbagai bentuk infografis dan poster tentang perilaku hidup aman dari COVID-19 dan protokol kesehatan yang harus diadaptasi sebelum melonggarkan pembatasan sosial atau *lockdown*

Indonesia mulai mengadopsi konsep *new normal* sejak pertengahan Juni 2020. Pemerintah menekankan bahwa *new normal* merupakan strategi transisi untuk mengaktifkan kembali aktivitas sosial-ekonomi yang tertunda akibat pandemi. Namun dalam implementasinya, istilah *new normal* kerap menimbulkan kebingungan di masyarakat karena dianggap terlalu menyederhanakan perubahan sosial yang diperlukan. Pemerintah kemudian mengganti istilah tersebut menjadi “adaptasi kebiasaan baru,” walaupun secara substansi keduanya merujuk pada pola adaptasi masyarakat terhadap protokol kesehatan dalam aktivitas sehari-hari.

Adopsi konsep *new normal* juga dilatarbelakangi oleh motif pragmatis, yaitu keinginan untuk memulihkan kembali aktivitas ekonomi dan menormalkan kehidupan masyarakat melalui penerapan perilaku kesehatan baru. Akan tetapi, pemakaian *new normal* yang cenderung dangkal dan penyederhanaan menjadi sekadar protokol perilaku dianggap bertentangan dengan pandangan banyak pihak. Mereka meyakini bahwa pandemi Covid-19 seharusnya menjadi momentum untuk mendorong perubahan mendasar yang dapat melahirkan

struktur kesetaraan baru dalam masyarakat (Mas'udi, W dan Winanti 2020).

Pandemi telah menjadi sebuah momentum atau struktur peluang untuk mendorong transformasi sosial dan ekonomi yang lebih inklusif serta berkeadilan. Hal ini terjadi karena pandemi membuka tabir kelemahan dan sisi gelap dalam tata kelola sistem yang ada. Oleh karena itu, diskusi mengenai *new normal* tidak seharusnya hanya terbatas pada aspek protokol perilaku sebagaimana yang ramai dibicarakan oleh politisi dan pengambil kebijakan. Sebaliknya, diskusi tersebut perlu memperluas fokus pada dinamika perubahan yang sedang terjadi di berbagai arena akibat pandemi Covid-19, serta menilai sejauh mana perubahan-perubahan tersebut memiliki kekuatan untuk merombak struktur dan relasi sosial, ekonomi, dan politik yang ada.

1.4.2 Konsep Partisipasi Politik

Partisipasi politik pada dasarnya merujuk pada keterlibatan warga negara dalam kegiatan yang ditujukan untuk memengaruhi proses pembuatan keputusan politik maupun pemilihan pejabat publik. Kaase dan Marsh mendefinisikan partisipasi politik sebagai rangkaian aktivitas sukarela yang dilakukan oleh individu untuk memengaruhi pemerintah dan kebijakan publik melalui berbagai mekanisme, baik langsung maupun tidak langsung. (Mujani 257AD). Definisi serupa dikemukakan oleh Huntington dan Nelson yang menekankan bahwa partisipasi politik merupakan tindakan individu yang bertujuan memengaruhi kebijakan pemerintah atau memilih pemimpin politik. (Rohaniah 2015). Miriam Budiardjo memberikan definisi yang lebih komprehensif bahwa partisipasi politik mencakup seluruh aktivitas yang dilakukan oleh warga negara untuk berperan serta dalam proses politik, baik melalui aktivitas elektoral seperti memilih, maupun aktivitas non-elektoral seperti berdiskusi politik, menghadiri pertemuan publik, atau terlibat dalam organisasi masyarakat. (Budiardjo 2010). Semua definisi partisipasi politik di atas mencakup beberapa poin mendasar: aktivitas, subjek, tujuan dan kesukarelaan.

Aktivitas atau bentuk partisipasi politik yang dimaksud oleh Kaase dan Marsh tidak merujuk pada aspek pemikiran, keyakinan, sikap, atau kecenderungan individu. Misalnya, perasaan tidak setuju terhadap kebijakan

pemerintah atau rasa kedekatan dengan partai politik tidak dapat dikategorikan sebagai aktivitas partisipasi politik. Namun, apabila ketidaksetujuan tersebut diwujudkan melalui tindakan konkret, seperti mengajukan protes atau menandatangani petisi sebagai respons terhadap kebijakan pemerintah, maka hal itu termasuk ke dalam contoh aktivitas partisipasi politik.

Batasan mengenai partisipasi politik ini juga ditegaskan oleh Huntington dan Nelson, yang menyatakan bahwa partisipasi politik berkaitan dengan kegiatan-kegiatan nyata, bukan sekadar sikap atau persepsi individu (Rohaniah 2015). Dalam konteks ini, komponen subjektif seperti orientasi politik—yang mencakup pengetahuan tentang politik, minat terhadap isu-isu politik, perasaan mengenai kompetisi dan efektivitas politik, serta persepsi tentang relevansi politik—tidak termasuk dalam kategori partisipasi politik. Sikap dan perasaan politik dipandang sebagai aspek yang berkaitan dengan tindakan politik, namun tetap dipisahkan dari aktivitas politik itu sendiri. Kaase dan Marsh menegaskan bahwa fokus partisipasi politik terletak pada aktivitas yang dilakukan oleh warga negara biasa, bukan oleh elite pemerintahan (Mujani 257AD). Partisipasi politik yang dilakukan oleh warga negara biasa bersifat sukarela, artinya tidak didorong oleh paksaan maupun imbalan materi. Hal ini sejalan dengan pandangan Huntington dan Nelson yang menekankan bahwa subjek partisipasi politik adalah warga negara sebagai individu dalam kapasitas mereka sebagai masyarakat biasa, bukan sebagai profesional atau elite politik. (Rohaniah 2015). Kegiatan partisipasi politik mencakup semua kegiatan yang mempengaruhi pemerintah, terlepas apakah kegiatan tersebut dilakukan secara perorangan atau kolektif.

Menurut Kaase dan Marsh, tujuan partisipasi politik adalah untuk memengaruhi kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah maupun dalam

proses pemilihan pemimpin atau pejabat pemerintahan. Pandangan ini sejalan dengan gagasan Miriam Budiardjo, yang menyatakan bahwa kegiatan partisipasi politik mencakup tindakan memilih pimpinan negara, baik secara langsung maupun tidak langsung, serta upaya memengaruhi kebijakan publik (public policy). Sementara itu, Huntington dan Nelson menegaskan bahwa partisipasi politik terbatas pada aktivitas yang bertujuan memengaruhi proses pengambilan keputusan oleh pemerintah, yang diarahkan kepada pejabat-pejabat dengan kewenangan politik.

Para ahli mengemukakan berbagai model dan bentuk untuk menjelaskan partisipasi politik. Bentuk partisipasi politik, ukuran tingkat partisipasi, serta indikator-indikator yang digunakan untuk mengukurnya dapat bervariasi. Perbedaan antara satu ukuran atau dimensi dengan yang lain dapat dilihat dari tingkat intensitas partisipasi politik, serta bentuk atau kategori partisipasi politik itu sendiri. Kaase dan Marsh, misalnya, membagi partisipasi politik ke dalam dua bentuk utama, yaitu partisipasi politik konvensional dan non-konvensional. (Mujani 257AD).

Bentuk partisipasi politik konvensional adalah segala bentuk aktivitas yang dilakukan warga negara biasa untuk mempengaruhi hasil akhir (outcomes) dari proses politik yang sesuai dengan prosedur atau aturan yang berlaku. Bentuk partisipasi politik nonkonvensional adalah segala bentuk aktivitas yang dilakukan warga negara biasa untuk mempengaruhi hasil akhir dari proses politik yang tidak sesuai dengan norma hukum dan kebiasaan yang mengatur partisipasi politik (Rohaniah 2015).

Partisipasi politik konvensional merupakan bentuk partisipasi politik yang dianggap normal dalam praktik demokrasi modern. Sementara itu,

partisipasi politik non-konvensional merujuk pada bentuk partisipasi yang tidak lazim dilakukan dalam situasi normal, bahkan sering kali berbentuk aktivitas ilegal, penuh kekerasan, atau bersifat revolusioner. Dalam kategori partisipasi politik konvensional, Kaase dan Marsh memasukkan kegiatan seperti keterlibatan dalam kampanye serta pemilihan umum. Adapun pada partisipasi politik non-konvensional, mereka mencakup aksi demonstrasi, pemogokan kerja, hingga perusakan fasilitas publik. Almond memperluas kategori partisipasi politik konvensional dengan menambahkan kegiatan seperti diskusi politik, bergabung dalam kelompok organisasi, serta menghubungi pejabat publik sebagai bagian dari bentuk partisipasi tersebut.

Seperti telah dijelaskan sebelumnya, kesadaran politik merupakan salah satu faktor yang memengaruhi tingkat partisipasi politik masyarakat. Tinggi rendahnya tingkat partisipasi politik berkaitan erat dengan tingkat kesadaran politik dan kepercayaan terhadap pemerintah. Apabila seseorang memiliki kesadaran politik serta kepercayaan yang tinggi terhadap pemerintah, maka partisipasi politik yang ditunjukkan bersifat aktif. Sebaliknya, jika seseorang memiliki kesadaran politik yang tinggi tetapi kepercayaan terhadap pemerintah rendah, partisipasinya cenderung bersifat militan atau radikal.

Selanjutnya, ketika seseorang memiliki kesadaran politik yang rendah namun tingkat kepercayaan terhadap pemerintah tinggi, maka bentuk partisipasi politiknya cenderung pasif. Sementara itu, jika seseorang memiliki kesadaran politik dan kepercayaan terhadap pemerintah yang sama-sama rendah, partisipasinya akan cenderung apatis terhadap aktivitas politik. (Kolip 2013).

1.4.3 Teori Kesadaran Politik

Kesadaran politik merupakan konsep yang menjelaskan sejauh mana individu memahami, merespons, dan menilai fenomena politik dalam masyarakat. Menurut Almond dan Verba, kesadaran politik terdiri atas tiga komponen orientasi: orientasi kognitif, orientasi afektif, dan orientasi evaluatif. Ketiganya berperan dalam membentuk persepsi dan perilaku politik seseorang. Menurut Almond dan Verba, seseorang dikatakan memiliki kesadaran politik apabila ia telah memahami dan menyadari berbagai hal yang berhubungan dengan sistem politik, baik dari sisi input maupun output (Verba 1984). Input dalam konteks ini mencakup berbagai tuntutan maupun dukungan yang disampaikan oleh masyarakat kepada pemerintah. Sementara itu, output merujuk pada keputusan, tindakan, atau hasil kebijakan yang diimplementasikan oleh pemerintah. Sejalan dengan pemikiran Ramlan Surbakti, kesadaran politik dapat diartikan sebagai kesadaran individu terhadap hak dan kewajiban yang dimilikinya sebagai warga negara (Surbakti 2013). Menurut Miriam Budiardjo, terdapat pengertian yang sedikit berbeda mengenai kesadaran politik. Ia mendefinisikan kesadaran politik sebagai perasaan individu bahwa dirinya berada dalam sistem pemerintahan serta keyakinan bahwa mereka, dalam batas tertentu, dapat memengaruhi pihak yang berkuasa. Dengan kata lain, kesadaran politik juga mencerminkan adanya kepercayaan individu terhadap kemampuan dirinya untuk berperan dalam proses politik atau yang dikenal sebagai **political efficacy** (Budiardjo 2010). Dia menambahkan, kesadaran politik merupakan salah satu faktor penting tingginya tingkat partisipasi politik.

Kesadaran politik dan partisipasi politik memiliki hubungan yang bersifat linear. Asumsinya, semakin tinggi tingkat kesadaran politik individu, maka semakin

besar pula tingkat partisipasi politik masyarakat. Semakin seseorang menyadari bahwa dirinya berada dalam sistem pemerintahan, maka ia akan semakin terdorong untuk menuntut haknya dalam menyuarakan aspirasi dan terlibat dalam proses penyelenggaraan pemerintahan. (Budiardjo 2010). Pada umumnya kesadaran politik diartikan sebagai kesadaran akan hak dan kewajiban seseorang sebagai warga negara. Hal ini berkaitan dengan pengetahuan tentang lingkungan sosial politik, serta minat dan perhatiannya terhadap pemerintah. Tidak hanya itu, kesadaran politik juga berkaitan dengan sikap dan kepercayaan seseorang terhadap sistem politik. Penilaian seseorang terhadap pemerintah, dipercaya atau tidak, disukai atau tidak. Kesadaran politik dijadikan salah satu ukuran untuk melihat budaya politik suatu negara bagi Gabriel Almond dan Sidney Verba.

Dalam konteks kesadaran politik, pengetahuan dan pemahaman seseorang terhadap sistem politik berkaitan erat dengan komponen orientasi kognitif. Pada tahap ini, pemilih pemula mulai menyadari hak dan kewajibannya sebagai warga negara, misalnya dengan memahami tata cara pemilihan umum, mengenal nama-nama tokoh politik, serta mengikuti kebijakan-kebijakan pemerintah melalui berbagai sumber informasi seperti berita. Selanjutnya, kesadaran politik pada tahap sikap berkaitan dengan orientasi afektif. Hal ini tercermin dari sikap atau perasaan pemilih pemula—baik berupa rasa suka maupun tidak suka—terhadap kebijakan yang dihasilkan oleh pemerintah. Sikap tersebut terlihat ketika pemilih pemula merasa diperhatikan, diuntungkan, atau terdampak secara langsung oleh kebijakan yang telah diterapkan.

Pada tahap tindakan atau perilaku, kesadaran politik merupakan hasil integrasi dari orientasi kognitif dan afektif, yang disebut sebagai orientasi evaluatif. Pada tahap ini, pemilih pemula mampu menilai dan mengevaluasi kinerja

pemerintah atau partai politik berdasarkan pengetahuan, pemahaman, serta sikap mereka terhadap kebijakan yang ada. Perilaku politik ini merupakan wujud akhir dari proses internalisasi pengetahuan dan sikap terhadap sistem politik.

Gabriel Almond dan Sidney Verba menjelaskan ada 3 pola kesadaran politik (Verba 1984), yaitu:

- Kesadaran input mencakup perhatian dan keterlibatan masyarakat terhadap proses politik, seperti memahami isu politik, mengikuti pemberitaan, atau berpartisipasi dalam diskusi publik.
- Kesadaran output merujuk pada sejauh mana individu menyadari dampak kebijakan pemerintah dalam kehidupannya sehari-hari, seperti bagaimana kebijakan sosial memengaruhi kesejahteraan mereka
- Penerimaan informasi politik dan merasakan kebebasan dalam memberikan opini. Sejauh mana penerimaan informasi politik pemilih pemula dapat diukur melalui beberapa indikator, di antaranya apakah mereka mengenal nama pejabat publik, mengenal nama-nama menteri, nama-nama partai politik, dan kebebasan mereka dalam mengungkapkan opininya di depan umum.

1.4.4 Telaah Pustaka

Bagian ini, peneliti menyajikan beberapa studi sebelumnya yang digunakan sebagai referensi dalam penelitian. Kesamaan dan perbedaan di antara penelitian-penelitian tersebut membantu peneliti dalam membangun argument - argumen dalam penulisan.

Tabel. 2. Penelitian Terdahulu

Penulis	Judul	Pembahasan
Arip Gunawan (2021)	Partisipasi politik masyarakat pesisir pada pemilu kabupaten pesisir	Hasil penelitian menunjukkan faktor kedekatan sosial, jaringan komunitas lokal, dan pengaruh tokoh masyarakat sangat kuat dalam menentukan pilihan politik. Kondisi geografis

	barat tahun 2021	dan keterbatasan akses informasi menjadi kendala utama masyarakat pesisir dalam menerima informasi politik. Temuan ini selaras dengan konteks Kepulauan Sangkarrang, di mana jaringan sosial lokal dan kedekatan kandidat memiliki pengaruh besar.
Ilma Nur Amalia (2014)	Tingkat Partisipasi Politik Masyarakat Pesisir Dalam Pemilihan Presiden Tahun 2014 (Studi Masyarakat Desa Bonang, Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang)	Penelitian ini menemukan bahwa tingkat partisipasi politik masyarakat pesisir pada Pemilihan Presiden 2014 di Desa Bonang tergolong rendah, dipengaruhi oleh faktor visi-misi calon, pencarian informasi, kondisi ekonomi, karakteristik calon, serta pengaruh lingkungan keluarga. Namun, penelitian ini berbeda dengan temuan penelitian Anda, karena masyarakat Kepulauan Sangkarrang justru menunjukkan peningkatan partisipasi selama pandemi Covid-19. Perbedaan ini menegaskan adanya fenomena unik yang terjadi di wilayah kepulauan Makassar

Sumber: Dirangkum dari beberapa sumber

Telaah pustaka ini menunjukkan bahwa meskipun banyak penelitian

menemukan bahwa masyarakat pesisir memiliki tingkat partisipasi politik yang rendah, penelitian Anda menghadirkan temuan yang berbeda. Hal ini menunjukkan adanya dinamika politik lokal yang khas di Kepulauan Sangkarrang.

1.4.5 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini dibangun dari pemahaman bahwa partisipasi politik masyarakat tidak hanya dipengaruhi oleh faktor struktural seperti kondisi geografis, akses informasi, dan situasi sosial, tetapi juga oleh tingkat kesadaran politik yang dimiliki warga. Dalam konteks Kepulauan Sangkarrang, keterbatasan akses transportasi, minimnya fasilitas informasi, dan kondisi pandemi Covid-19 menjadi faktor eksternal yang seharusnya menekan partisipasi pemilih. Namun fenomena Pilkada Makassar 2020 menunjukkan peningkatan tingkat partisipasi hingga 71 persen, yang mengindikasikan adanya dinamika internal masyarakat yang perlu dianalisis lebih jauh.

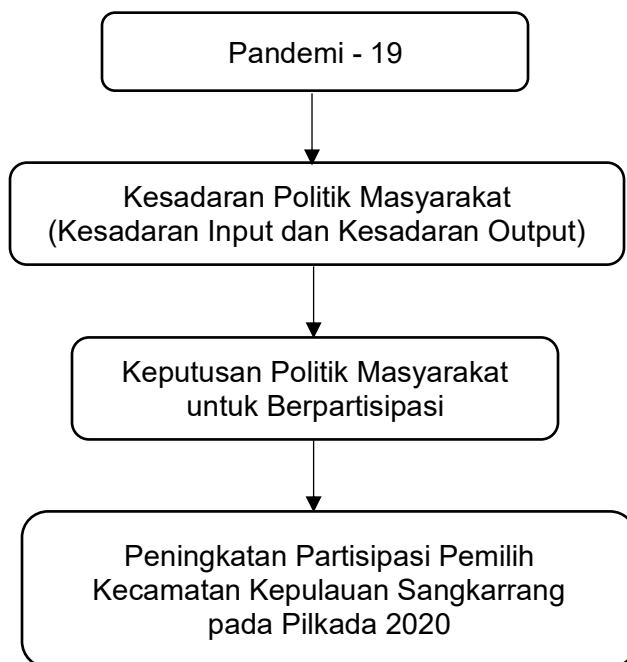
Untuk menjelaskan fenomena tersebut, penelitian ini menggunakan teori kesadaran politik Almond dan Verba yang membedakan kesadaran politik ke dalam dua dimensi: kesadaran input dan kesadaran output. Kesadaran input mencakup kemampuan masyarakat menerima dan memahami informasi politik, mengenal calon pemimpin, serta mengetahui prosedur pemilihan. Kesadaran output mencakup penilaian masyarakat terhadap kebijakan pemerintah dan dampak program yang dirasakan secara langsung. Kedua bentuk kesadaran inilah yang diasumsikan berpengaruh terhadap keputusan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pemilu.

Selain itu, teori partisipasi politik digunakan untuk melihat bagaimana tindakan politik—khususnya penggunaan hak pilih—dapat muncul dari kombinasi faktor internal (kesadaran politik, motivasi, persepsi terhadap calon) dan eksternal (sosialisasi KPU, peran tokoh lokal, jaringan sosial kepulauan). Dalam kerangka ini, partisipasi politik dipahami sebagai hasil interaksi antara kesadaran politik dan lingkungan sosial-politik masyarakat kepulauan.

Dengan demikian, kerangka pemikiran penelitian ini memposisikan bahwa kesadaran politik masyarakat kepulauan (input–output), yang terbentuk melalui akses informasi, pengalaman terhadap kebijakan pemerintah, dan interaksi sosial lokal, berpengaruh langsung terhadap tingkat partisipasi pemilih di Kecamatan

Kepulauan Sangkarrang dalam konteks Pandemi Covid-19. Faktor-faktor eksternal seperti sosialisasi KPU, kedekatan warga dengan kandidat, serta situasi pandemi berperan sebagai penguat atau penghambat. Penelitian ini bertujuan melihat bagaimana keseluruhan faktor tersebut bekerja dan mengapa, dalam kondisi keterbatasan geografis dan pandemi, partisipasi politik masyarakat Kepulauan Sangkarrang justru meningkat.

1.4.6 Skema Berfikir



BAB II METODE PENELITIAN

2.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan **metode kualitatif** dengan pendekatan **triangulasi**, khususnya **studi kasus**. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini berupaya memahami fenomena sosial secara mendalam, terutama mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kesadaran politik dan hubungannya dengan peningkatan partisipasi pemilih masyarakat Kepulauan Sangkarrang pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar tahun 2020.

Sebagai penelitian studi kasus, fokus analisis diarahkan pada suatu kelompok masyarakat tertentu dalam konteks sosial dan geografis yang spesifik. Studi kasus memungkinkan peneliti menelaah fenomena secara komprehensif melalui eksplorasi mendalam terhadap pengalaman, pandangan, dan perilaku masyarakat.

2.2 Lokasi Penelitian

Penelitian ini telah dilakukan di Kecamatan Kepulauan Sangkarrang kota Makassar. Pulau Sangkarrang dipilih sebagai lokasi penelitian karena menurut data KPU Kota Makassar merupakan salah satu kecamatan di Kota Makassar dengan persentase penggunaan hak suara mencapai 71% pada pemilihan kepala daerah Kota Makassar tahun 2020. Selain itu pemilihan lokasi di Kepulauan Sangkarrang juga merupakan salah satu wilayah yang memiliki tingkat perekonomian yang rendah di Kota Makassar. Hal ini tentu menarik mengingat masyarakat Kecamatan kepulauan Sangkarrang tinggal jauh dari daratan utama dan akses transportasi yang dibatasi karena Pandemi. Oleh karena itu, lokasi penelitian ini dipusatkan di Pulau Sangkarrang guna menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini. Penelitian ini berfokus pada masyarakat Pulau Sangkarrang.

2.3 Sumber Data

Jenis data yang di perlukan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Kedua jenis data tersebut diperoleh melalui :

2.3.1 Sumber Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung pada saat

pelaksanaan penelitian. Sumber data primer berasal dari individu-individu atau responden yang sengaja dipilih untuk mendapatkan informasi yang relevan dengan permasalahan penelitian. Data primer dalam penelitian ini meliputi hasil wawancara dan dokumentasi yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti. Pada penelitian ini, data primer diperoleh dengan menggunakan teknik wawancara mendalam yang dilakukan dengan informan yang berkaitan dengan sikap dan alasan masyarakat pulau Sangkarrang menggunakan hak pilihnya di masa Pandemi.

2.3.2 Sumber Data Sekunder

Data sekunder berfungsi sebagai pelengkap dan pendukung untuk memperkuat data primer yang telah dikumpulkan. Data ini diperoleh melalui studi kepustakaan dengan cara menelaah buku, artikel, serta literatur lain yang relevan dengan topik penelitian. Secara umum, data sekunder merupakan data yang telah diolah sebelumnya dan disajikan dalam bentuk dokumen tertulis atau naskah.

2.4 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian kualitatif, teknik pengumpulan data menjadi aspek yang sangat penting karena kualitas hasil penelitian sangat bergantung pada ketepatan dan kedalaman data yang dikumpulkan. Penelitian ini menggunakan tiga teknik utama: wawancara, observasi, dan dokumentasi.

2.4.1 Wawancara

Wawancara merupakan teknik utama yang digunakan untuk menggali informasi secara langsung dari informan. Penelitian ini menggunakan wawancara terbuka, bersifat semistruktur, dan dilakukan secara mendalam (in-depth interview).

Wawancara semistruktur dipilih agar peneliti tetap memiliki arah pertanyaan yang jelas, tetapi memberi ruang bagi informan untuk mengemukakan pandangan secara bebas dan luas. Teknik ini memungkinkan peneliti memahami pengalaman, motivasi, persepsi, dan alasan masyarakat

dalam berpartisipasi pada Pilkada 2020.

Selama proses wawancara, peneliti menciptakan suasana yang santai dan bersahabat untuk mendorong keterbukaan informan. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan disesuaikan dengan kebutuhan penelitian, terutama terkait kesadaran politik masyarakat, persepsi terhadap pandemi, motivasi memilih, hambatan dalam menggunakan hak pilih, dan pandangan mereka terhadap Pilkada dalam kondisi pandemi.

Walaupun pedoman wawancara disusun sebelumnya, peneliti tetap membuka kemungkinan munculnya pertanyaan tambahan yang relevan selama proses wawancara berlangsung. Informan dipilih melalui teknik purposive sampling, yakni mereka yang dianggap paling memahami fenomena yang diteliti.

Tabel. 2. Narasumber

No	Nama	Jabatan
1	Endang Sari, S.IP, M.Si	Komisioner KPU Kota Makassar
2	Irwansyah	Ketua KPPS
3	Hj. Haeneni	Masyarakat Kep. Sangkarrang
4	Arman	Masyarakat Kep. Sangkarrang
5	Hafid	Masyarakat Kep. Sangkarrang

2.4.2 Dokumen

Dokumen merupakan hasil karya atau catatan dari peristiwa yang telah terjadi di masa lalu. Dalam konteks penelitian ini, dokumen yang dimaksud meliputi data hasil pemilihan umum Kota Makassar yang diperoleh dari Komisi

Pemilihan Umum (KPU) Kota Makassar. Selain itu, dokumen juga mencakup berbagai sumber rujukan yang relevan, seperti jurnal ilmiah, media massa, dan berita yang mendukung kajian penelitian ini.

2.5 Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses penting dalam penelitian kualitatif yang dilakukan sejak awal pengumpulan data hingga penelitian berakhir. Proses ini mencakup upaya peneliti dalam memilah, mengorganisasi, menginterpretasi, serta menarik makna dari data yang telah terkumpul. Pada penelitian ini, teknik analisis data menggunakan model yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman yang terdiri dari tiga tahapan utama: reduksi data, penyajian data (data display), dan penarikan kesimpulan/verifikasi.

Model ini dipilih karena mampu memberikan struktur analitis yang sistematis terhadap data kualitatif, memungkinkan peneliti memahami hubungan antar kategori, serta memudahkan proses interpretasi terhadap fenomena yang dikaji, yaitu kesadaran politik dan partisipasi masyarakat Kepulauan Sangkarrang pada Pilkada 2020.

2.5.1 Reduksi data

Reduksi data merupakan tahap awal dalam proses analisis, yaitu proses pemilahan, pemusatan perhatian, penyederhanaan, serta transformasi data mentah yang diperoleh dari wawancara, observasi, maupun dokumentasi. Pada tahap ini, peneliti memilih data yang relevan, mengategorikan, dan mengorganisasikannya ke dalam pola tertentu sesuai fokus penelitian.

Reduksi data tidak hanya dilakukan setelah semua data terkumpul, tetapi berlangsung sepanjang proses penelitian, sejak peneliti mulai mengumpulkan data di lapangan. Setiap informasi yang dianggap tidak relevan dengan tujuan penelitian dipangkas, sedangkan data penting dipertahankan dan diberi kode tertentu agar memudahkan proses pengelompokan. Dengan demikian, reduksi data berfungsi untuk mengarahkan peneliti agar tetap fokus pada permasalahan inti, yaitu faktor-faktor yang memengaruhi kesadaran politik dan partisipasi politik masyarakat kepulauan di masa pandemi Covid-19.

2.5.2 Data Display

Penyajian data atau data display adalah proses menyusun informasi yang

telah direduksi ke dalam bentuk yang terorganisasi sehingga memungkinkan peneliti memahami gambaran keseluruhan fenomena yang sedang diteliti. Penyajian data membantu peneliti melihat pola, hubungan, dan kecenderungan tertentu yang muncul dari data lapangan. Dalam penelitian kualitatif, bentuk penyajian data yang paling umum digunakan adalah teks naratif, tabel ringkas, matriks tematik, atau bagan hubungan antar kategori. Pada penelitian ini, penyajian data dilakukan terutama dalam bentuk narasi deskriptif,

2.5.3 Penarikan Kesimpulan.

Penarikan kesimpulan pada tahap ini peneliti telah memberikan makna dari data yang didapatkan dari hasil wawancara. Kumpulan hasil informasi yang dicatat beserta temuan catatan lapangan disusun rapi untuk melakukan penarikan kesimpulan namun pada tahapan ini diperlukan proses verifikasi agar peneliti dapat menghindari atau mengurangi bias dan subjektivitas peneliti.